

Tindaklanjuti Permintaan Dewan



Hery Subowo

BPK akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut laporan keuangan Pemprov Jateng tahun anggaran (TA) 2014, atas permintaan DPRD Jateng. Pasalnya, pada pemeriksaan APBD 2014 yang baru saja selesai,

■ Baca TINDAKLANJUTI
.hal 7

Tindaklanjuti

dari hal 1

ternyata masih banyak yang kelewatan. DPRD mengindikasikan banyak sekali penyimpangan.

Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Hery Subowo mengatakan, laporan keuangan Pemprov Jateng TA 2014 yang akan diperiksa lebih lanjut diantaranya adalah kegiatan mendahului anggaran perubahan APBD TA 2014, sebesar Rp 174 miliar.

BPK RI beralasan, kegiatan mendahului anggaran tersebut belum diperiksa karena pada saat melakukan pemeriksaan, BPK RI tidak menerima data tersebut.

"Jadi karena dewan sudah minta kepada kami (BPK, *red*) untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka kami akan melakukan penelaahan lebih lanjut," ungkapnya usai dimintai penjelasan oleh DPRD Jateng di ruang Banggar Gedung Berlian,

kemarin.

Kapan itu akan dilakukan? Hery Subowo menyampaikan tergantung dewan. Kapan permintaan pemeriksaan lebih lanjut itu akan disampaikan secara resmi kepada BPK. Sebab, pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan Pemprov Jateng selama ini memang hanya pada kulitnya saja.

Dimana pemeriksaannya adalah berbasis resiko. Resiko yang diperhitungkan BPK adalah resiko kontrol. Sehingga mungkin saja ada pekerjaan yang tidak terkena sampling pemeriksaan oleh BPK. Karena tidak mungkin BPK memeriksa seluruh pekerjaan. Apalagi waktu pemeriksaan dari BPK untuk melakukan pemeriksaan hanya 30 hari.

"Kalau ingin lebih dalam, maka harus ada pemeriksaan yang lain. Harus ada revisi obyek

pemeriksaannya," katanya.

Selain kegiatan mendahului anggaran, yang akan diperiksa lebih lanjut adalah 25 paket pekerjaan yang belum selesai pekerjaannya pada tahun 2014.

Disampaikannya, dari pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemprov Jateng TA 2014, ada potensi kerugian negara Rp 2,820 miliar dan yang Rp 2,589 miliar sudah dikembalikan ke kas daerah. Sedangkan se-Jateng, potensi kerugian mencapai Rp 50,084 miliar, dan sebanyak Rp 18,086 sudah dikembalikan ke kas daerah.

Hanya saja, Hery Subowo tidak berani memastikan apakah pemeriksaan lebih lanjut itu akan mengubah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemprov Jateng. "Saya tidak mau berandai-andai. Itu tergantung hasil pemeriksaan," tukasnya. (udi/muz)